

MAHASISWA KPI UIN RAIH PRESTASI Juara III Lomba Video Kreatif



Nabiila bersama timnya.

YOGYA (KR) - Masa pandemi bukan halangan kaum milenial untuk mengekspresikan diri dan berkarya. Itu pula yang dilakukan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam Anava's Secret Video Ads Competition 2021 tingkat nasional. Nabiilah Capriani, mahasiswa Prodi Komunikasi

Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi menjadi salah satu pemenang dalam ajang lomba yang menghasilkan karya video iklan kreatif dan berkualitas yang diselenggarakan Anava's Secret. Kompetisi ini diikuti 100 peserta dari seluruh Indonesia dengan karya kreatif dan variatif. Dalam pengumuman yang digelar secara *live streaming* di gedung Dharma Negara Alaya Denpasar

Utara Bali, Kamis (28/1) itu, video karya Nabiilah dan tim, Elbi Fitra Yudi yang juga mahasiswa satu angkatan di Prodi KPI dibantu Witra sebagai *lighting man* berhasil mendapatkan Juara III.

"Untuk persiapan produksi, membuat konsep, reading naskah dan mempersiapkan alat-alat yang dipakai, kemudian *take video indoor* dan *outdoor*, lalu proses akhir editing video dan audio," kata Nabiilah, Jumat (29/1).

Meski di masa wabah Covid-19, Nabiilah dan tim tetap menikmati proses pembuatan video. Ia mengungkapkan melalui lomba ini untuk menguji kemampuan dan menambah pengalaman. Cara yang tepat mengasah *passion* dalam diri, selain berlatih mengembangkan kemampuan. "Kalau menang jadi ajang apresiasi dan makin percaya diri untuk semangat membuat karya," ucapnya. **(Feb)**

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka

JAKARTA (KR) - Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki komitmen yang tinggi dalam memajukan kebahasaan dan kesastraan. Oleh karena itu, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim didampingi Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Endang Aminuddin Aziz secara resmi meluncurkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka pada Jumat (29/1).

"Saya merasa bangga dan berterimakasih atas kerja keras seluruh tim dan jajaran di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Untuk itu, UKBI versi terbaru dengan nama UKBI Adaptif Merdeka secara resmi saya luncurkan," ujar Mendikbud secara virtual di Jakarta.

Saat ini, kata Mendikbud, telah banyak dilakukan berbagai inovasi dalam hal pengembangan, pembinaan dan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia. Hal ini diharapkan dapat bermuara pada layanan yang profesional di bidang kebahasaan dan kesastraan dalam konteks pembinaan kepada penutur Bahasa Indonesia. "Pengembangan UKBI Adaptif Merdeka merupakan bentuk keberhasilan pemerintah

dalam pemajuan kebahasaan dan kesastraan melalui lompatan dalam hal desain dan sistem layanan uji," katanya.

Mendikbud berharap UKBI Adaptif Merdeka ini dapat memberikan dampak positif kepada penutur Bahasa Indonesia dari berbagai kalangan. "Saya harap UKBI ini dapat meningkatkan aspirasi dalam memahami dan mempelajari Bahasa Indonesia, menghasilkan berbagai karya tulis dan digital berbahasa Indonesia, juga melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam membawa Bahasa Indonesia ke kancah internasional," harap Mendikbud.

Pada kesempatan yang sama, E Aminudin Aziz mengatakan, tujuan utama pengembangan UKBI

Adaptif adalah untuk memotret kemahiran berbahasa penutur Bahasa Indonesia lintas performa dengan cepat, tepat dan efisien. "Pemutakhiran UKBI ke dalam bentuk adaptif akan membuka peluang bagi penutur Bahasa Indonesia lebih luas untuk mengikuti UKBI, termasuk kalangan profesional di berbagai bidang dan pembelajar asing yang selama ini kesulitan mengikuti UKBI hanya karena harus mengikuti satu paket uji lengkap yang kurang sesuai dengan estimasi kemahirannya. Hal itu menyebabkan unsur tebak-tebakan menjadi tinggi karena soal-soal tidak dipahami pada level kemahirannya," ujarnya.

Sebelum UKBI Adaptif ini diluncurkan, setiap soal UKBI telah melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Selain itu, melalui usaha intensif dengan melibatkan peserta uji coba sejumlah 2.190 di seluruh Indonesia, pada tahun 2020 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah memutakhirkan sistem UKBI itu sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga menghasilkan sistem uji UKBI Adaptif Merdeka. **(Ati)**

AIK, Ciri Khas PT Muhammadiyah-Aisyiyah

MAGELANG (KR) - Workshop Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dengan tema 'AIK sebagai Ruh Kehidupan Kampus' dilaksanakan Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) melalui Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (LP2SI), Rabu dan Kamis (27-28/1).

AIK merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di Indonesia. Workshop dilakukan melalui ruang temu virtual, dihadiri Rektor Unimma Dr Suliswiyadi MAg, Badan Pembina Harian (BPH) Unimma, Kepala Program Studi (Kaprosdi) dan dosen pengampu mata kuliah AIK.

Rektor Unimma mengatakan, sudah waktunya AIK bukan sekadar menjadi ciri khas. Tetapi lebih dari itu, AIK harus bisa menjadi asas dan jiwa pendidikan Muhammadiyah. "Dalam konteks inilah pen-

tingnya rumusan sistem pendidikan Muhammadiyah yang menempatkan AIK sebagai jiwa atau ruh pendidikan Muhammadiyah," katanya.

Rektor menambahkan, jika diperlukan gagasan Reformulasi Gerakan AIK-isasi Unimma. "Di kampus Unimma sendiri, misalnya, bisa dengan mendesain AIK secara kurikulum, kokurikuler dan ekstrakurikuler serta setting hidden curriculum menuju standar kampus Islami," tambahnya.

Ketua Badan Pembina Harian (BPH) Unimma Drs H Sugiyono MSi dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kegiatan workshop, karena hal tersebut merupakan bentuk keseriusan pimpinan untuk mendukung mata kuliah AIK. "Urgensi pengembangan kurikulum AIK, diharapkan dengan mata kuliah tersebut, lulusan Unimma mempunyai pembeda dari lulusan perguruan tinggi lain," ujarnya. **(Tha)**

DISDIKPORA DIY MENYAMBUT BAIK

Pengembangan Sekolah Penggerak

YOGYA (KR) - Perubahan kebijakan reformasi pendidikan di Indonesia tak bisa sukses tanpa ada perubahan di dalam sekolah. Adapun bentuk perubahan itu bisa dimulai dari sekolah-sekolah penggerak yang bisa menjadi contoh dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menyambut baik program sekolah penggerak yang menjadi program Kemendikbud.

Apalagi salah satu kabupaten di DIY yaitu Gunungkidul ditunjuk sebagai sekolah penggerak. "Kami menyambut baik program sekolah penggerak seperti yang direncanakan pemerintah pusat. Disdikpora DIY berharap keberadaan seko-

lah penggerak bisa mencerminkan sebagai salah satu sekolah inklusif. Artinya di sekolah tersebut terjadi suasana pembauran termasuk bagi anak-anak disabilitas," kata Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya MPd di Yogyakarta, Kamis (28/1).

Didik Wardaya mengungkapkan, keberadaan sekolah penggerak diharapkan bisa menggerakkan sekolah-sekolah. Dengan begitu menjadi panutan, tempat pelatihan dan inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Karena di sekolah penggerak, guru memberikan pelajaran tak hanya satu arah, melainkan berbagai aktivitas yang menyenangkan dan memuat kompetensi-kompetensi bernalar kritis, kolaborasi dan kreatif.

Konsekuensi dari itu sekolah penggerak dituntut memiliki guru yang berpihak kepada anak. Hal tersebut penting karena guru harus memahami setiap anak berbeda dan memiliki cara pengajaran yang berbeda pula, sehingga mereka dituntut mengajar pada level yang tepat untuk anak.

"Sekolah penggerak bisa berfungsi dengan maksimal apabila didukung kemampuan guru untuk bisa melayani anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Untuk itu, perlu penyediaan guru pendamping khusus di satu sekolah yang bisa diakui dalam status mengajarkannya. Mengam untuk mewujudkan itu butuh proses, tapi saya optimis DIY bisa mewujudkan," terangnya. **(Ria)**

EKONOMI

2020, Laba BRI Turun Tajam

JAKARTA (KR) - Tahun 2020 merupakan tahun terberat, namun Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih berhasil melewatinya dengan sehat dan kuat. Terbukti BRI berhasil mengumpulkan laba yang cukup positif.

"Selama tahun 2020, BRI berhasil mengumpulkan laba Rp 18,66 triliun. Namun bila dibanding tahun 2019, perolehan laba ini turun tajam sekitar 45,72 persen dari Rp 34,41 triliun. Penurunan laba ini juga dikarenakan BRI melakukan pencadangan yang cukup besar terutama untuk mengkaver penyelamatan UMKM, sehingga total pencadangan BRI saat ini mencapai 237,73 persen," kata Dirut BRI Sunarso pada paparan kinerja kuartal IV tahun 2020, secara virtual di Jakarta, Jumat (29/1).

Menurutnya, tahun 2020 memang situasinya sangat tidak formal. Bahkan BRI juga pernah ada satu bulan tidak membukukan laba sama sekali, karena ketika itu mengoperasikan seluruh sumber daya untuk melakukan penyelamatan terhadap nasabah terutama UMKM. Namun pada kuartal III dan kuartal IV, BRI sudah membuka laba sekitar 14,02 persen,

Sementara untuk kredit, menurut Sunarso, BRI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 938,37 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 3,89 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 903,20 triliun. Adapun kredit yang disalurkan tersebut paling besar ke sektor UMKM yakni mencapai 82,13 persen dengan pertumbuhan kredit mikro tumbuh 14,8 persen, kredit kecil dan menengah tumbuh 3,88 persen dan kredit konsumen tumbuh 2,26 persen. **(Lmg)**

TEMUKAN 133 FINTECH P2P LENDING ILEGAL

Satgas Waspada Investasi Minta Masyarakat Pahami 2L

JAKARTA (KR) - Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga kembali menemukan 133 platform fintech peer to peer lending ilegal dan 14 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat sejak Desember 2020 sampai awal Januari 2021 ini. Untuk itu, Satgas meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi korban dari fintech lending ilegal dan penawaran investasi yang tidak berizin tersebut.

"Dari upaya pencegahan dan patroli siber yang terus menerus kami lakukan, angka temuan fintech lending dan penawaran investasi ilegal ini menurun dibanding sebelumnya. Kewaspadaan masyarakat harus terus dijaga agar tidak menjadi korban dari fintech lending ilegal dan penawaran investasi yang tidak berizin," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing di Jakarta, Jumat (29/1).

Tongam menegaskan, sosialisasi mengenai bahaya fintech lending ilegal dan investasi ilegal ini

harus terus disampaikan ke masyarakat melalui berbagai alat komunikasi seperti media massa dan sosial media yang bisa mencapai masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air. Sebab penawaran fintech lending ilegal dan investasi ilegal ini masih akan muncul di tengah-tengah masyarakat.

"Penting untuk selalu diingatkan ke masyarakat bahwa sebelum memanfaatkan fintech lending dan mencoba berinvestasi harus pahami dua L. Yaitu Legal atau perusahaan itu harus punya izin dari otoritasnya dan Logis, yaitu penawaran keun-

tungan yang ditawarkan sesuai dengan keuntungan yang wajar," tandasnya.

Untuk itu, Tongam meminta masyarakat untuk menanyakan langsung kepada Kontak OJK 157 atau WA 081157157157 bila ingin memanfaatkan layanan fintech lending atau mengikuti ingin berinvestasi, atau juga jika ingin melaporkan adanya kegiatan fintech lending dan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Satgas Waspada Investasi akan terus melakukan patroli siber rutin yang frekuensinya akan terus ditingkatkan sejalan dengan masih banyaknya temuan fintech lending dan penawaran investasi ilegal melalui berbagai saluran teknologi komunikasi di masyarakat.

"Dari temuan tersebut, Satgas sudah mengirimkan informasinya kepada Bareskrim Polri untuk dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memblokir

website dan aplikasi telepon seluler dari entitas-entitas tersebut. Kami sudah menutup sebanyak 3.056 fintech lending ilegal sejak 2018 hingga Januari 2021 ini," ungkapnya.

Sementara dari 14 entitas investasi ilegal yang ditindak pada awal tahun ini di antaranya melakukan kegiatan yaitu 2 perdagangan berjangka komoditi (PBK) tanpa izin, 3 cryptocurrency tanpa izin, 3 koperasi tanpa izin, 2 penjualan langsung tanpa izin dan 4 kegiatan lainnya. Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapuangmu.ojk.go.id.

"Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id," pungkas Tongam. **(Ira/Lmg)**

Investor Pasar Modal DIY Diprediksi Tumbuh

YOGYA (KR) - Jumlah investor pasar modal di DIY mengalami pertumbuhan signifikan mencapai 68.117 investor hingga Desember 2020. Meskipun masih berada dalam kondisi pandemi Covid-19, justru pasar modal DIY maupun pasar modal tanah air tetap bertumbuh tidak terkecuali tahun 2021 ini.

Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) DIY Irfan Noor Riza mengatakan, realisasi pertumbuhan jumlah investor pasar modal sebanyak 68.117 investor tersebut merupakan suatu angka pertumbuhan jumlah investor tahunan tertinggi di DIY selama ini. Sementara itu, jumlah total transaksi pasar modal di DIY mencapai Rp 26,157 triliun dengan rata-rata transaksi per bulan mencapai Rp 2,179 triliun sepanjang 2020 lalu.

"Capaian pertumbuhan jumlah investor di DIY yang justru tinggi

maupun realisasi transaksi yang total mencapai Rp 26,157 investor di tengah pandemi Covid-19 pada 2020. Dengan capaian tersebut, maka kami sangat optimis pasar modal di DIY akan semakin bertumbuh kedepannya," terang Irfan di Yogyakarta, Jumat (29/1).

Irfan menjelaskan, realisasi capaian jumlah investor maupun nilai transaksi pasar modal di DIY pada 2020 lalu mengalami peningkatan atau kenaikan yang signifikan. Dari data BEI DIY, tercatat jumlah investor pasar modal di DIY mencapai 48.922 investor dengan total nilai transaksi mencapai Rp 15,669 triliun atau rata-rata Rp 1,424 triliun per bulan sepanjang 2019 lalu. Jumlah investor pasar modal di DIY baru di angka 49.649 investor pada Januari 2020 kemudian bertambah signifikan mencapai 68.117 investor pada Desember 2020. Sehingga pertum-

buhan jumlah investor di DIY berkisar 18.468 investor selama Januari hingga Desember 2020.

"Jadi kami sangat optimis pasar modal DIY akan semakin bertumbuh kedepan didukung beberapa katalis positif. Pemerintah juga meyakini ketidakpastian pasar modal akibat pandemi selama 2020 akan berakhir," tegasnya.

Katalis positif yang dinilai akan mendorong pasar modal di DIY pada 2021, disampaikan Irfan mulai dari pemerintah mulai bisa mengatasi pandemi Covid-19 tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang rendah dan stimulus fiskal pemerintah untuk mendorong ekonomi akan lebih baik. Tingkat kepercayaan pelaku pasar akan pulih sehingga indeks harga saham gabungan (IHSG) akan terkerek hingga kisaran 6.800 hingga 7.000 pada akhir Desember 2021. **(Ira)**

STOK LAMA BERLAKU HINGGA 31 DESEMBER 2021

DJP Kenalkan Materai Baru

JAKARTA (KR) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan meterai tempel baru sebagai pengganti meterai tempel lama desain tahun 2014. Desain meterai tempel baru mengusung tema Ornamen Nusantara. Meterai tempel baru tersebut sudah bisa diperoleh masyarakat di Kantor Pos seluruh Indonesia saat ini.

"Meterai tempel baru ini memiliki ciri umum dan ciri khusus yang perlu diketahui oleh masyarakat," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama dalam surat elektroniknya, Jumat (29/1).

Hestu Yoga menyampaikan, ciri umum meterai tempel baru tersebut di antaranya

terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila, angka '10000' dan tulisan 'SEPU-LUH RIBU RUPIAH' yang menunjukkan tarif bea meterai. Kemudian teks mikro modulasi 'INDONESIA', blok ornamen khas Indonesia, dan seterusnya.

"Ciri khususnya adalah warna meterai didominasi merah muda, serat berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas, garis hologram sekuriti berbentuk persegi panjang. Materai tempel baru ini memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan, serta tulisan 'djp' dan sebagainya," tuturnya.

Terkait stok meterai tempel edisi 2014 yang masih tersisa,

masyarakat masih dapat menggunakannya sampai dengan 31 Desember 2021 dengan nilai paling sedikit Rp 9.000. "Caranya dengan membeli tiga meterai masing-masing senilai Rp 3.000, dua meterai masing-masing Rp 6.000 atau meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000 pada dokumen," tandasnya.

DJP mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada akan meterai tempel palsu dan meterai tempel bekas pakai (rekondisi). Masyarakat diimbau untuk meneliti kualitas dan memperoleh meterai tempel dari penjual yang terpercaya. "Untuk mendapatkan salinan peraturan ini dan peraturan lain dapat mengunjungi www.pajak.go.id," imbu Hestu. **(Ira)**